

Myanmar Diseputar KTT Asean

TANGGAL 26 April 2021 ini ASEAN menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta. KTT akan membahas krisis pascakudeta militer di Myanmar. Pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing, menyatakan siap hadir dalam KTT itu. Sebaliknya, Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) pimpinan Suu Kyi, menyatakan lebih berhak berpartisipasi dalam KTT tersebut. Bagaimana dan mau apa ASEAN?

Sebenarnya sejak awal Myanmar menganut demokrasi liberal. Namun setelah berjalan sekitar dua tahun negeri itu dilanda kerusuhan sehingga hampir mengalami anarki. Beberapa kali negeri itu berganti pemerintahan, mirip RI era demokrasi liberal di tahun 1950-an.

Sejak lahir sampai berusia 73 tahun sekarang ini, pemerintah Myanmar belum pernah bisa diterima seluruh lapisan masyarakat di negeri itu. Ironis! Suatu pemerintahan yang seharusnya dicintai dan didukung rakyat, justru dibenci rakyatnya sendiri. Berbagai gerakan separatis etnis minoritas masih menggajal jalannya pemerintahan di negara itu. Sudah banyak cara yang ditempuh Myanmar guna menciptakan stabilitas, tetapi berbagai kendala terus menantang, bahkan terancam disintegrasi.

Belum Tuntas

Ancaman disintegrasi yang mewarnai kehidupan politik di Myanmar selama ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah dan belum tuntasnya penanganan masalah yang dihadapi negara multi-etnis itu. Permasalahan yang dihadapi Myanmar, memang sangat kompleks. Di samping adanya diskrepansi dan divergensi di bidang politik, juga karena heterogenitas bangsa yang terdiri dari banyak suku, pemberontakan kaum komunis, tuntutan pemulihan kehidupan demokrasi, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan narkoba. Masalah

A Kardiyat Wiharyanto

suku tergolong cukup pelik di negara itu. Sejarah negeri itu ternyata banyak juga diwarnai oleh pertentangan bahkan pertarungan antara pemerintah pusat yang didominasi suku Burma dengan suku minoritas lainnya.

Menyadari kekurangmampuannya menghadapi tuntutan dan pemberontakan beruntun dari kelompok-kelompok suku minoritas dan komunis tersebut, sejak 1962 Myanmar membiarkan diri diperintah diktator militer dengan politik netralis ketat. Politik tersebut hanya berbuah kecaman dan tidak mampu menyatukan Myanmar.

Kecaman paling keras datang dari AS maupun negara-negara Uni Eropa. Berbeda dengan Barat, negara-negara ASEAN khususnya Indonesia melakukan pendekatan persuasif. Setelah Myanmar menjadi Ketua ASEAN, sungguh-sungguh diselenggarakan pemilihan umum yang dimenangkan Partai Liga Nasional (NLD) pimpinan Suu Kyi.

Pertikaian politik di Myanmar mencuat kembali setelah pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh pimpinan NLD, termasuk Presiden Win Myint ditahan militer. Ini terjadi setelah pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menyatakan negara dalam keadaan darurat yang berlaku selama satu tahun. Para pendukung NLD menyatakan kecewa, sebab cara mereka bertindak seperti diktator.

Prihatin

Dunia prihatin atas perkembangan politik di Myanmar. Banyak negara menyatakan tak ada hal yang dapat membe-

narkan terjadinya penahanan Aung San Suu Kyi dan para pendukungnya untuk kembali ke abolutisme. Bagaimana sebenarnya suara hati Myanmar dalam perubahan global saat ini?

Kondisi Myanmar agak berbeda dengan kondisi negara-negara di Asia Tenggara lain pada pascarevolusi yang pada umumnya segera dapat melakukan konsolidasi diri. Sudah banyak cara yang ditempuh guna menciptakan stabilitas, tetapi berbagai kendala terus menantang.

Ancaman disintegrasi yang mewarnai kehidupan politik di Myanmar selama ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah dan belum tuntasnya penanganan masalah yang dihadapi negara multi-etnis itu. Permasalahan yang dihadapi Myanmar, memang sangat kompleks. Mudah-mudahan KTT ASEAN di Jakarta sekarang ini bisa mengurai benang kusut Myanmar. □

*) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,
Dosen Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta